ANALISIS KEBIJAKAN PENGARUS UTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

¹⁾Agustina Rahmawati, ²⁾Hanantyo Sri Nugroho
Universitas Amikom Yogyakarta
agustinarahma@amikom.ac.id
hanantyosrinugroho@amikom.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang paradigma pembangunan yang berrespektif gender pada pemerintah daerah. Masalah ini menarik untuk diteliti karena terdapat bias ketidakadilan pada proses maupun hasil pembangunan, dimana menempatkan perempuan bukan sebagai sasaran dan aset pembangunan, melainkan sebagai beban pembangunan. Setidaknya penelitian ini menggunakan perspektif Women in Development (WID) dalam menganalisis di Pemerintah Daerah. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Pada metode deskriptif kualitatif harus memperhatikan validasi data. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan triangulasi data. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mewujudkan peran produktif bagi perempuan dalam pembangunan. Temuan hasil penelitian ini yaitu adanya kebijakan dan program yang berspektif gender di Pemerintah Kabupaten Sleman seperti pembentukan daerah PUG, pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA) serta capaian apresiasi APE tingkat mentor.

Kata kunci: Woman in Development, Kebijakan Pengarus Utamaan Gender Kabupaten Sleman

Abstract

This article examines the development paradigm with a gender perspective in local government. This problem is interesting to study because there is a bias of injustice in the process and results of development, which places women not as targets and development assets, but as development burdens. At least this study uses the perspective of Women in Development (WID) in analyzing the Regional Government. Furthermore, the method used is a qualitative descriptive method. The qualitative descriptive method must pay attention to data validation. Therefore, this study used data triangulation. The purpose of this research is to know the policies of the Sleman Regency Government in realizing the productive role of women in development. The findings of this study are that there are policies and programs that have a gender perspective in the Sleman Regency Government, such as the establishment of the PUG area, the establishment of a Child Friendly District (KLA) and the achievement of APE appreciation at the mentor level.

Keywords: Woman in Development, Gender Mainstreaming Policy in Sleman Regency.

A. PENDAHULUAN

Kebijakan yang berperspektif gender memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan dalam proses maupun hasil pembangunan. Pada perkembangannya, masih terdapat proses kebijakan maupun proses pembangunan lebih mengutamakan laki-laki. Selain itu, juga terdapat hasil pembangunan yang lebih diperuntukan bagi laki-laki. Hal ini dikarenakan masih terjaga budaya patriarki di kalangan masyarakat Indonesia. Konsekuensi yang muncul dari budaya patriarki adalah kehidupan ini milik laki-laki sehingga apapun berdasarkan pada standar laki-laki. Hal ini sebagai ketidakadilan pada proses dan hasil pembangunan, dimana seharusnya dilakukan dan dinikmati secara merata dan adil oleh semuanya, baik laki-laki maupun perempuan.

Paradigma yang dapat digunakan untuk melihat implementasi kebijakan yang berprespektif gender yakni *Women in Development (WID)*. Paradigma ini dilatarbelakangi bahwa secara kuantitas jumlah perempuan sebanding dengan jumlah laki-laki, serta perempuan adalah sumberdaya yang berharga sehingga perlu dilibatkan dalam pembangunan. Selain itu, paradigma pembangunan *Women in Development* juga menempatkan perempuan sebagai sasaran dan asset. Tujuan paradigma *Women in Development* ini adalah melibatkan perempuan dalam pembangunan sehingga pembangunan lebih efisien dengan tekanan pada peran produktif perempuan tanpa melihat aspek reproduktifnya. Lebih lanjut, terdapat beberapa capaian dari pradigma *Women in Development* tersebut yakni bidang politik dan sosial, dimana didirikannya kementerian ataupun lembaga yang mengafirmasi kepentingan perempuan. Selain itu, terdapat juga pada bidang hukum yakni dengan dilahirkan dan diratifikasinya CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

Paradigma *Women in Development* hanya berhasil meningkatkan perempuan secara material. Akan tetapi, peningkatan tersebut tidak berhasil memunculkan keberdayaan perempuan secara ekonomi dan sosial. Hal tersebut menyebabkan agenda perempuan tetap terpinggirkan dalam perencanaan pembangunan. Selain itu,

paradigma tersebut hanya meningkatkan partisipasi perempuan dalam pasar kerja, dimana berada pada segmen pasar kerja menengah-bawah, sehingga tidak berhasil meningkatkan keberdayaan perempuan itu sendiri. Dengan demikian, masih terdapat hambatan pada implemementasi kebijakan yang berperspektif gender.

Institusi pemerintah daerah yang mampu melakukan inovasi dalam pengarus utamaan gender (PUG) adalah Pemerintah Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman telah ditunjuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai mentor bagi peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas kelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) (Publikasi dan Media KemenPPPA, 2019). Artinya, menarik kemudian untuk mengetahui kemampuan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam memberikan peran produktif bagi perempuan dalam implementasi kebijakan maupun pembangunan. Dengan demikian, peneliti mengajukan judul “Analisis Kebijakan Pengarus Utamaan Gender Dalam Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Sleman”. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mewujudkan peran produktif bagi perempuan dalam pembangunan.

B. METODE PENELITIAN

Sasaran penelitian ini adalah kebijakan yang berprespektif gender di Pemerintah Kabupaten Sleman. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah metode penelitian yang melakukan penelitian pada beberapa atau semua aspek potensial dari suatu unit atau serangkaian kasus tertentu. Sementara itu, metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif deskriptif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002). Sementara itu, metode penelitian kualitatif fokus pada tindakan manusia, proses pembentukan tindakan, dan interaksi sosial (Muhadjir, 2000). Selanjutnya, metode analisis

data yang digunakan adalah analisis data interaktif yaitu analisis yang dilakukan dalam bentuk interaktif pada 3 (tiga) komponen utama yang saling terkait satu sama lain (Milles, 1994):

1. Reduksi data yang diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. Sajian data. Sub proses ini merupakan suatu bentuk “penyajian” yang diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan atau diversifikasi. Dalam sub proses ini, peneliti mulaimelakukan tindakan interpretasi yaitu memberikan makna pada data atau informasi yang telah disajikan.

Penelitian kualitatif faktor penting yang harus diperhatikan adalah validitas data, untuk mengetahui validitas data, penelitian ini menggunakan model triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pengecekan validitas data yang memanfaatkan sesuatu selain data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan (Moleong, 2002). Triangulasi data dalam penelitian ini akan dicapai dengan cara peneliti akan mengecek ulang informasi yang diberikan. Selain itu, informasi yang diperoleh akan diuji keakuratannya dengan data pengamatan serta data dari pengamatan terkait dengan topik penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Carl J. Frederick (dalam Islamy, 2007) kebijakan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kadang-kadang kebijakan publik menunjuk pada suatu istilah atau konsep guna menjelaskan pilihan-pilihan tindakan tertentu yang sangat khas atau spesifik, sebagai contoh pada bidang-bidang tertentu dalam sektor-sektor fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, atau kesejahteraan.

Adapun pendapat lain dikemukakan oleh Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan (dalam Islamy, 2007) mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Hal ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. James E. Anderson (dalam Islamy, 2007) mengartikan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Hal tersebut menegaskan bahwa proses kebijakan harus mampu merumuskan tujuan-tujuannya. Sebuah kebijakan tanpa adanya tujuan tidak memiliki arti, bahkan tidak mustahil akan menimbulkan masalah baru. Lain halnya menurut Amara Raksasataya (dalam Islamy, 2007) mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu sebagai berikut identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Terdapat paradigma yang dapat digunakan untuk melihat kebijakan yang berprespektif gender yakni Women in Development (WID). Paradigma ini dilatarbelakangi bahwa secara kuantitas jumlah perempuan sebanding dengan jumlah laki-laki, serta perempuan adalah sumberdaya yang berharga sehingga perlu dilibatkan dalam pembangunan. Selain itu, paradigma Women in Development juga menempatkan perempuan sebagai sasaran dan aset pembangunan (Lamphere, 2015). Adapun, tujuan paradigma Women in Development ini adalah melibatkan perempuan dalam pembangunan sehingga pembangunan lebih

efisien dengan tekanan pada peran produktif perempuan tanpa melihat aspek reproduktifnya. Lebih lanjut, terdapat beberapa capaian dari pradigma Women in Development tersebut yakni bidang politik dan sosial, dimana didirikannya kementerian ataupun lembaga yang mengafirmasi kepentingan perempuan. Selain itu, terdapat juga pada bidang hukum yakni dengan dilahirkan dan diratifikasinya Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Meskipun demikian, paradigma Women in Development hanya berhasil meningkatkan perempuan secara material. Akan tetapi, peningkatan tersebut tidak berhasil memunculkan keberdayaan perempuan secara ekonomi dan sosial. Hal tersebut menyebabkan agenda perempuan tetap terpinggirkan dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, paradigma tersebut hanya meningkatkan partisipasi perempuan dalam pasar kerja, dimana berada pada segmen pasar kerja menengah-bawah sehingga tidak berhasil meningkatkan keberdayaan perempuan itu sendiri. Dengan demikian, masih terdapat hambatan pada kebijakan yang berperspektif gender.

Lebih lanjut, terdapat paradigma gender and development. Paradigma ini berasumsi bahwa persoalan mendasar dalam pembangunan adalah hubungan gender yang tidak adil dan konstruksi sosial yang dibuat atas peran laki-laki dan perempuan tersebut dapat diubah atau dipertukarkan. Oleh karena itu, kebijakan mengatasi ketidakadilan gender adalah memerangi akar masalah ketidakadilan itu. Keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam pembangunan adalah penting. Selanjutnya, tidak hanya pelibatan perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan dalam berbagai kebijakan maupun program, tetapi laki-laki harus dituntut harus memahami dan memikirkan kebutuhan perempuan (*gender needs*) dalam setiap kebijakan maupun program pembangunan tersebut (Wright, 2016). Artinya, paradigma ini berfokus kepada laki-laki dan perempuan, tidak hanya berfokus kepada perempuan. Dengan demikian, masyarakat dan berbagai institusi mengubah cara berpikir dan praktik pada penerapan kebijakan maupun program agar mendukung

persamaan kesempatan, pilihan, dan kesetaraan.

Selain itu, terdapat juga paradigma gender mainstreaming. Paradigma ini lebih mendukung keterlibatan perempuan dalam pembangunan dengan memasukkan nilai-nilai perempuan dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan pemerintah dan pengambil kebijakan harus terlebih dahulu secara aktif mempromosikan rencana-rencana kebijakan maupun program yang berperspektif gender. Artinya, terdapat kerangka kerja dan metodologi pelaksanaan, yakni mengevaluasi dan mengorganisir proses kebijakan maupun program agar pengambil kebijakan dapat mengakomodasi gender sebagai arus utama dalam pembangunan (Kementerian PPPA, 2011). Adapun, beberapa langkah yang diambil adalah kesamaan akses dan kontrol terhadap sumber daya antara laki-laki dan perempuan, sensitivitas gender dalam perencanaan dan kebijakan, adanya kebutuhan kebijakan gender, adanya stereotip gender, kesamaan gender di organisasi, hubungan gender, serta pembagian kerja berdasarkan perbedaan gender.

1. Perencanaan Pengarus Utamaan Gender Pemerintah Kabupaten Sleman

Pengarus utamaan gender dalam pembangunan merupakan strategi pada program pembangunan untuk mencapai suatu keadilan dan kesetaraan. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, dimana keadilan dan kesetaraan gender menjadi pembangunan nasional. Konsep program pembangunan yang mengafirmasi tentang keadilan dan kesetaraan gender telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Hal tersebut seperti terdapat pada pada misi pembangunan Kabupaten Sleman 2016-2021 di bawah kepemimpinan Bupati Sleman Sri Purnomo pada poin ke 5 yang sebelumnya juga diselaraskan dengan program RPJMN 2015-2019 dan RPJMD DIY 2012-2017. Poin ke 5 itu berbunyi meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional (seimbang). Misi ini dimaksudkan bahwa walaupun masyarakat Sleman berkembang dinamis, tetapi tetap tidak meninggalkan dan kehilangan budaya lokal yang luhur dan baik. Disamping itu terhadap pemberdayaan perempuan tidak terbatas pada

peningkatan jumlah perempuan dalam berbagai peran, tetapi juga memperhatikan kesetaraan dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Misi tersebut didukung oleh program: 1. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 3. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 4. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 5. Program pengembangan wawasan kebangsaan 6. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 7. Program pendidikan politik masyarakat 8. Program pengembangan nilai budaya 9. Program pengelolaan kekayaan budaya 10. Program pengelolaan keragaman budaya 11. Program pelestarian pengembangan peninggalan budaya 12. Program sejarah, bahasa, sastra dan permusiuman 13. Program pelestarian cagar budaya dan warisan budaya 14. Program sarana prasarana keistimewaan urusan kebudayaan 15. Program adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya 16. Program pengelolaan taman budaya 17. Program peningkatan peran serta kepemudaan.

2. Dinamika Pengarus Utamaan Gender di Kabupaten Sleman

Peningkatan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional bertujuan agar mampu mewujudkan pelestarian budaya yang ada pada masyarakat, perlindungan perempuan, serta anak. Oleh karena itu, salah satu perwujudan pelestarian budaya yang ada di masyarakat dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pada konteks perlindungan perempuan dan anak, khusus kesetaraan gender pembangunan di Kabupaten Sleman tetap memperhatikan terkait pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai peran supaya tidak mengalami ketimpangan gender. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak ditunjukkan dengan 0,92% penurunan kasus terhadap kekerasan perempuan dan anak. Adapun kesetaraan gender yang ditunjukkan dengan persentase keterwakilan perempuan di DPRD (pada tahun 2018) baru mencapai 26% karena harapannya parlemen perempuan

mampu menjamin kepentingan kaum perempuan menjadi salah satu prioritas kebijakan, diantaranya terkait dengan isu pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan layanan kesehatan.

Tahun 2017, angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) tercatat sebesar 95,62 meningkat dari tahun 2016 sebesar 95,51. IPG diturunkan dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan menggunakan data penduduk perempuan. Kenaikan ini disebabkan karena pembangunan perempuan lebih cepat dibandingkan laki-laki. Berdasarkan komponen pembentuknya, komponen kesehatan stabil pada angka 0,83. Sedangkan komponen pendidikan dan pendapatan mengalami kenaikan. Meskipun komponen pendapatan meningkat. namun jika dilihat berdasarkan jenis pekerjaan utama, perempuan lebih mendominasi pada pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan ketekunan, seperti tenaga usaha jasa, tenaga usaha penjualandan tenaga usaha pertanian. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kabupaten Sleman pada tahun 2017 sebesar 79,51, tertinggi se-DIY. IPG merupakan indikator kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam hal peranan aktif dan power dari sisi politik dan pengambilan keputusan, ekonomi serta pendapatan. Persentase komponen masing-masing adalah 26%, 44,31% dan 38,43%. Peran gender dari sisi politik dan pengambilan keputusan dilakukan proxi dengan keterlibatan perempuan di parlemen. Keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional merupakan pendekatan dari sisi ekonomi. Sedangkan sisi pendapatan dilakukan pendekatan dengan kontribusi pendapatan yang dihasilkan perempuan.

Permasalahan perlindungan perempuan dapat diminimalkan dengan berkoordinasi lebih intensif dengan lembaga yang peduli dengan perlindungan perempuan dan anak. Pemerintah daerah juga harus lebih responsif terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan mengoptimalkan peran Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A). Optimalisasi peran perempuan di segala bidang juga diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Gender.

Tabel 1. Komponen dan Indikator IPM Kabupaten Sleman, 2016-2018

Uraian	Satuan	2016	2017	2018
Angka Harapan Hidup	Tahun	74,60	74,63	74,69
Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,64	10,65	10,66
Harapan lama sekolah	Tahun	16,08	16,48	16,71
Konsumsi riil per kapita yang disesuaikan	Rp	14921	15365	15844
IPM		82,15	82,85	83,42

Sumber: <http://bps.go.id/site/pilihdata>

3. Analisis Kebijakan Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Sleman

Kebijakan Pengarus Utamaan Gender tercantum dalam RPJMD, dimana terdapat kebijakan pembangunan keluarga, yang tertera pada poin ketiga yakni membangun keluarga berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender. Dalam pelaksanaan kebijakan gender Pemerintah Kabupaten Sleman berusaha mentransformasikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang ada di tingkat desa. Upaya itu dilakukan dengan harapan kebijakan pengarus utamaan gender tersebut mempunyai dampak yang riil dirasakan masyarakat. Adapun, beberapa program yang telah dilaksanakan selama masa kepemimpinan Bupati Sri Purnomo. *Pertama*, Membuat daerah yang menerapkan PUG yakni Condongcatur (Depok), Merdikorejo (Tempel), Wedomartani (Ngemplak), Sardonoarjo (Ngaglik) dan Wukirsari (Cangkringan). Best practise daerah yang telah menerapkan dengan baik yakni Wukirsari (Cangkringan), Condongcatur (Depok), dan Sumberharjo (Prambanan). Beberapa wilayah ini dinilai telah mampu melaksanakan PUG dan menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di tingkat daerah. Pentingnya keberadaan asosiasi warga (civil society) termasuk ornop perempuan yang dinamis di daerah tersebut juga turut andil dalam pelaksanaannya. Ketiga daerah ini pun telah mampu menciptakan berbagai inovasi pelaksanaan

PUG. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari komitmen Kepala Daerah dan kolaborasi dari semua pihak. Pembangunan responsif gender di Kabupaten Sleman difokuskan pada kelompok rentan seperti masyarakat miskin, disabilitas, perempuan dan anak serta kelompok yang rawan di daerah bencana. Adapun peningkatan kapabilitas tersebut jika tanpa perspektif gender tidak akan menyentuh persoalan struktural berupa relasi gender yang tidak seimbang. Sebagai contoh pada unit terkecil di dalam rumah tangga yang berkontribusi pada *time poverty*.

Kedua, membuat Kabupaten Layak Anak (KLA). Contohnya di berbagai instansi pelayanan publik menyediakan taman bermain kecil untuk anak-anak. Harapannya ketika anak diajak orangtua berkunjung ke instansi tersebut tidak bosan. Ketiga, Kabupaten Sleman juga berhasil meraih prestasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat mentor. Hal tersebut harus dipertanggungjawabkan melalui pelaksanaan PUG hingga sampai lini daerah. Pemberian APE ini dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang telah berhasil menerapkan strategi pengarusutamaan gender, inovasi dan pencapaian dalam kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Adapun indikator dalam penilaian APE tersebut meliputi kebijakan yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif terkait PUG, komitmen pemerintah/institusi dalam penyediaan anggaran dan perencanaan daerah, implementasi yang dilakukan oleh OPD

dalam menangani program gender serta hasil nyata yang dicapai oleh kelompok perempuan di daerah di bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menggunakan paradigma *Women in Development* yang mana lebih menekankan produktivitas perempuan dalam berbagai bidang.

D. KESIMPULAN

Perkembangan paradigma *Women in Development* saat ini telah diadopsi oleh institusi pemerintah, seperti Pemerintah Kabupaten Sleman. Paradigma ini berpijak pada pelibatan perempuan dalam pembangunan sehingga memberikan dampak yang lebih efisien melalui peran produktif perempuan tanpa melihat aspek reproduktifnya. Pentingnya kebijakan Pengarus Utamaan Gender (PUG) di kabupaten/kota juga dapat mendorong terwujudnya pembangunan nasional. Kabupaten Sleman dapat dikatakan telah mengimplementasikan kebijakan dan program yang bertumpu pada pengarusutamaan gender dengan baik. Hal ini dilihat dari berbagai program yang telah berhasil dilaksanakan seperti terbentuknya beberapa pemerintah desa yang menerapkan PUG, terbentuknya Kabupaten Layak Anak (KLA) serta berhasil memperoleh apresiasi APE tingkat mentor. Terlepas dari keberhasilan tersebut, ke depan diharapkan Kabupaten Sleman mewajibkan penanggulangan masalah dengan perspektif gender masuk dalam visi misi politisi yang maju dalam Pilkada & prioritas pembangunan daerah (RPJMD, APBD), perlu optimalisasi upaya pemerintah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan program gender supaya dampak yang dirasakan makin meluas, menambah kegiatan workshop maupun pelatihan SDM untuk meningkatkan pengetahuan dan skill khususnya pada kelompok rentan seperti masyarakat miskin, disabilitas, perempuan dan anak serta kelompok yang rawan di daerah bencana,

serta masih perlu ditingkatkannya monitoring dan evaluasi terhadap program PUG di Condongcatur (Depok), Merdikorejo (Tempel), Wedomartani (Ngemplak), Sardonoharjo (Ngaglik) dan Wukirsari (Cangkringan) dan Sumberharjo (Prambanan) sehingga ketercapaian program dapat terukur dengan indikator yang jelas terlebih di masa pandemi Covid-19. Dengan demikian, pembangunan Kabupaten Sleman dapat meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat khususnya keadilan dan kesetaraan gender.

E. REFERENSI

- Islamy, M. Irfan. 2007. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian PPPA. 2011. Policy Brief: Gender Mainstreaming. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Lamphere, Louise. 2015. Feminism in Anthropology. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences
- Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Milles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 1994. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. New Delhi: SAGE Publications.
- Publikasi dan Media KemenPPPA. 2019. Belajar Pelaksanaan PUG Yang Inovatif Dari Sleman. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 2016-2021
- Wright, Forrest D. 2016. Researching Developing Countries. Chandos Publishing.
- <http://bps.go.id/site/pilihdata>